

**PENERBITAN ENDORSEMENT SURAT LAUT DAN PAS BESAR PADA
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN (KSOP)
BERDASARKAN HUKUM POSITIF**

TESIS

Oleh:

BRAHMANTORO WIBOWO

2302190042



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

**PENERBITAN ENDORSEMENT SURAT LAUT DAN PAS BESAR PADA
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN (KSOP)
BERDASARKAN HUKUM POSITIF**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh
gelar Magister Hukum (M. H.) Pada Program Studi Hukum
Program Magister Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

BRAHMANTORO WIBOWO

2302190042



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan;

Nama : Brahmantoro Wibowo

NIM : 2302190042

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “Penerbitan Endorsement Surat Laut Dan Pas Besar Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Berdasarkan Hukum Positif” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 31 Januari 2026



Brahmantoro Wibowo
NIM: 2302190042



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

**PENERBITAN ENDORSEMENT SURAT LAUT DAN PAS BESAR PADA
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN (KSOP)
BERDASARKAN HUKUM POSITIF**

Oleh:

Nama : Brahmantoro Wibowo
NIM : 2302190042
Program Studi : Magister Hukum
Peminatan : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 31 Januari 2026
Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.
NUPTK: 7252746647130103

Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.
NUPTK: 1237749650130140

Ketua Program Studi Magister Hukum,



Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.
NUPTK : 1237749650130140

Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.
NUPTK: 5434757658137093



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Pada tanggal 31 Januari 2026 telah diselenggarakan sidang tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, atas nama

Nama : Brahmanoro Wibowo
NIM : 2302190042
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Hukum

Termasuk Ujian Tugas Akhir yang berjudul : "Penerbitan Endorsement Surat Laut Dan Pas Besar Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Berdasarkan Hukum Positif" oleh tim Penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.	Sebagai Ketua	
2. Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	
3. Dr. Marudut Parulian Silitonga, S.Th, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Brahmanoro Wibowo
NIM : 2302190042
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : Penerbitan Endorsement Surat Laut Dan Pas Besar Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Berdasarkan Hukum Positif

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta, 31 Januari 2026



Brahmanoro Wibowo
NIM: 2302190042

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya, Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Oleh karena itu Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Dr. David M.L. Tobing, S.H., M.Kn, selaku Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia.
2. Prof. Angel Damayanti, S.IP., M.Si., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
3. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Prof. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H., selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, sekaligus Dosen Pembimbing Pertama dan sebagai Dosen Penguji.
5. Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H. selaku Kaprodi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Kedua dan penguji.
6. Dr. Marudut Parulian Silitonga, S.Th, S.H., M.H. selaku dosen penguji.
7. Seluruh Dosen Pengajar di Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, atas ilmu, wawasan, dan inspirasi yang diberikan selama masa perkuliahan.
8. Kepada Pihak-pihak yang terkait yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu, terima kasih atas masukan dan dukungan nya selama penulis melakukan penelitian ini.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat dan permintaan maaf yang tulus jika seandainya dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kekeliruan, penulis juga menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan penulisan.

Jakarta, 31 Januari 2026

Penulis

Brahmantoro Wibowo

NIM: 2302190042

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah.	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	8
1. Kerangka Teori.....	8
2. Kerangka Konsep	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Orisinalitas Penelitian....	22
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Landasan Teori.....	26
1. Teori Kebijakan Publik	26
2. Teori Kepastian Hukum	31
B. Tinjauan umum tentang Pelayanan Publik.....	35
C. Tinjauan umum tentang Pelayanan.....	41
D. Tinjauan umum tentang surat status Kapal	46

BAB III PENGATURAN PENERBITAN ENDORSEMENT SURAT LAUT DAN PAS BESAR UNTUK MENJAMIN KEAMANAN DAN KESELAMATAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA.....	49
A. Pengaturan Surat Tanda Kebangsaan Kapal	49
B. Penerbitan Endorsement Surat Laut Dan Pas Besar.....	64
BAB IV ASPEK HUKUM PENERBITAN ENDORSEMENT SURAT LAUT DAN PAS BESAR PADA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN	86
A. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.....	86
B. Aspek Hukum Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kebijakan Penerbitan Endorsement Surat Laut Dan Pas Besar Dalam Melakukan Pelayanan Publik.....	96
BAB V PENUTUP.....	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA.....	131

ABSTRAK

Judul : Penerbitan Endorsement Surat Laut Dan Pas Besar Pada Kantor
Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (Ksop) Berdasarkan Hukum
Positif

Penerbitan Pengukuhan/Endorsement Surat Laut dan Pas Besar dilaksanakan dengan tujuan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran serta melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kelaiklautan kapal yang berlayar dari dan ke pelabuhan atau daerah pedalaman yang berada di wilayah kerja atau Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan DLKP kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Maka dari itu penerbitan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Pengukuhan/Endorsement Surat Laut dan Pas Besar, terdapat beberapa permasalahan yang signifikan yang dihadapi oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Proses pengukuhan atau endorsement sering kali melibatkan banyak dokumen dan persyaratan administratif yang rumit DAN jika tidak lengkap dapat mengakibatkan penundaan atau penolakan permohonan. Keterlambatan ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, termasuk antrian permohonan yang tinggi atau kekurangan staf untuk melakukan pemeriksaan. Sumber daya manusia yang terbatas di KSOP dapat menghambat efisiensi pelayanan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti kepustakaan atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*).

Sebagai Kesimpulan, (1) Pengaturan mengenai penerbitan Surat Laut dan Pas Besar di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat dan komprehensif, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Berdasarkan Undang-undang Nomor 66 Tahun 2024 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, kedua dokumen tersebut berfungsi sebagai Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia yang menjadi bukti hukum atas status kebangsaan dan legalitas kapal untuk berlayar. (2) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) memiliki peran strategis dalam menjamin keselamatan, keamanan, dan ketertiban pelayaran melalui penerapan fungsi hukum dan administrasi pelabuhan penerbitan. Endorsement Surat Laut dan Pas Besar tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga merupakan instrumen pengawasan negara terhadap kelaikan dan legalitas kapal untuk beroperasi.

Kata Kunci : Endorsement, Surat Laut Dan Pas Besar, Kantor Kesyahbandaran
Dan Otoritas.

ABSTRACT

Title: The Issuance of Sea Letters and Large Passes Endorsement at the Port Authority and Harbormaster's Office (KSOP) Based on Positive Law

The issuance of Sea Letters and Large Passports is carried out with the aim of ensuring the safety and security of shipping and performing a supervisory function over the seaworthiness of ships sailing to and from ports or inland areas located within the working area or Working Area (DLKr) and Area of Interest DLKP of the Harbour Master's Office and Port Authority. Therefore, the issuance of Standard Operating Procedures (SOP) for the Endorsement of Sea Letters and Large Passports has resulted in several significant problems faced by the Harbour Master's Office and Port Authority (KSOP). The confirmation or endorsement process often involves numerous documents and complex administrative requirements, and if these are incomplete, it can result in delays or rejection of applications. These delays can be caused by many factors, including a high volume of applications or a shortage of staff to carry out checks. Limited human resources at the KSOP can hamper the efficiency of services.

This research is normative legal research. Legal research refers to research conducted by examining literature or secondary data. Normative legal research is also known as doctrinal legal research. In this type of legal research, law is often conceptualised as what is written in legislation (law in book).

In conclusion, (1) The regulations concerning the issuance of Sea Letters and Large Passports in Indonesia have a strong and comprehensive legal basis, both in the national and international contexts. Based on Law No. 66 of 2024, the Third Amendment to Law No. 17 of 2008 concerning Shipping and Minister of Transportation Regulation No. PM 39 of 2017 concerning Ship Registration and Nationality, both documents serve as Indonesian Ship Nationality Certificates, which are legal proof of the nationality and legality of ships to sail. (2) The Harbour Master's Office and Port Authority (KSOP) has a strategic role in ensuring the safety, security and order of shipping through the implementation of legal and administrative functions of port issuance. The endorsement of the Certificate of Registry and the Large Ship Certificate not only serves an administrative function but also constitutes a state oversight instrument regarding the seaworthiness and legality of a vessel to operate.

Keywords: Endorsement, Sea Letter and Large Pass, Harbour Master's Office and Authority.